

**PENGARUH JENIS INDUSTRI TERHADAP LUAS
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR
DISCLOSURE) PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN:
STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG
TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

YUDHO ERDANU

NIM. C2C307056

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yudho Erdanu

Nomor Induk Mahasiswa : C2C307056

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH JENIS INDUSTRI TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL (CSR DISCLOSURE) PADA
LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN:
STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
PUBLIK YANG TERCATAT DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2009**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt.

Semarang, 5 Agustus 2010

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt.)

NIP. 19650520 199001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yudho Erdanu

Nomor Induk Mahasiswa : C2C 307 056

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH JENIS INDUSTRI TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL (CSR DISCLOSURE) PADA
LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN:
STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
PUBLIK YANG TERCATAT DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2009**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Agustus 2010

Tim Penguji :

1. Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt. (.....)
2. Drs. H. Sugeng Pamudji., M.Si., Akt. (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yudho Erdanu, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Jenis Industri Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 5 Agustus 2010

Yang membuat pernyataan,

(Yudho Erdanu)

NIM: C2C307056

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat luas pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) pada laporan tahunan dan bagaimana pengaruh jenis industri terhadap tingkat luas pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan jenis industri sebagai variabel independen, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dan tingkat pengungkapan CSR sebagai variabel dependen serta mengambil obyek penelitian berupa laporan tahunan (Annual Report) perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen jenis industri yang terdiri dari 9 jenis kelompok industri berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR dimana luas pengungkapan antar perusahaan dalam industri yang satu dengan industri lainnya berbeda-beda dikarenakan masing-masing industri memiliki karakteristik yang berbeda. Jenis industri, sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR. Kemudian secara bersama-sama variabel independen dan variabel kontrol berpengaruh terhadap tingkat luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Kata Kunci: Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, Pengungkapan CSR, Laporan Tahunan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jenis Industri Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Moch. Chabachib, M.Si, Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Daljono SE, M.si, Akt., selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bantuan dan saran kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu tercinta serta Adikku tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.

6. Andita Ayu Lestari, terima kasih atas doa, motivasi dan semangatnya. Semoga setelah ini kita selalu bersama dan tidak berjauhan lagi, love you.
7. Ahmad Rifan, Bulan Andina Syarline, Om Anang Wibowo, Isnaini Sarah Pratiwi dan Bagus Riyadi. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
8. Ahmad Rozi dan teman-teman Ekstensi (Reguler 2) Jurusan Akuntansi Angkatan 2007, terima kasih atas kerja sama dan bantuannya selama ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Stakeholders.....	9
2.1.2 Teori Legitimasi	11
2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR).....	12
2.1.4 Pengungkapan CSR	18
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Hipotesis.....	35
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	33
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	33
3.1.1 Variabel Dependen	33
3.1.2 Variabel Independen.....	34
3.1.3 Variabel Kontrol.....	34
3.2 Populasi dan Sampel	35

3.3	Jenis dan Sumber Data	37
3.4	Metode Pengumpulan Data	37
3.5	Metode Analisis	38
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	38
3.5.2	Pengujian Hipotesis	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Analisis Data	43
4.1.1	Analisis Statistik Deskriptif	43
4.1.2	Uji Asumsi Klasik	44
4.1.3	Analisis Regresi	48
4.1.4	Hasil Pengujian Hipotesis	52
4.2	Intepretasi Hasil	52
4.2.1	Jenis Industri	52
4.2.2	Ukuran Perusahaan	53
BAB V PENUTUP.....		54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Keterbatasan	55
5.3	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI.....	21
TABEL 3.1 Sampel Penelitian.....	35
TABEL 3.2 Pengambilan Sampel Acak Berstrata Cara Disproporsional.....	36
TABEL 4.1 Statistik Deskriptif.....	43
TABEL 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	44
TABEL 4.3 Hasil Uji Autokorelasi: Run Test	45
TABEL 4.4 Hasil Uji Normalitas: Nilai Kolmogorov-Smirnov	47
TABEL 4.5 Hasil Koefisien Determinasi	49
TABEL 4.6 Hasil Uji F	49
TABEL 4.7 Hasil Analisis Regresi	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1 Tingkatan Tanggung Jawab Perusahaan.....	15
GAMBAR 2.2 Model Kerangka Pemikiran.....	32
GAMBAR 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas: Grafik Scatterplot.....	46
GAMBAR 4.2 Hasil Uji Normalitas: Grafik Normal P-P Plot.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Daftar Perusahaan Sampel
LAMPIRAN B	Daftar Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI
LAMPIRAN C	Hasil Analisis Regresi dengan SPSS 16.0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial tidak dapat dipisahkan dari Good Corporate Governance (GCG) karena pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu prinsip yang berpengaruh dalam GCG. Pada dasarnya ada lima prinsip dalam GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesenjangan dan Kewajaran. Prinsip yang berkaitan erat dengan CSR adalah Responsibilitas yang merupakan aspek pertanggungjawaban dari setiap kegiatan perusahaan untuk melaksanakan prinsip *Corporate Social Responsibility* karena dalam berusaha, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari masyarakat sekitar, ditekankan juga pada dunia usaha kepada kepentingan pihak-pihak eksternal dimana perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholder* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya.

Diluar itu, lewat prinsip *responsibility* diharapkan perusahaan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. *Corporate Social Responsibility* sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja tetapi harus berpijak pada *triple bottom lines*, dimana

bottom lines selain aspek finansial juga terdapat aspek sosial dan lingkungan. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi keuangan saja tak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).

Berdasarkan standar dari Bank Dunia, terdapat beberapa komponen utama dalam CSR yang meliputi: (1) perlindungan lingkungan, (2) jaminan kerja, (3) Hak Asasi Manusia, (4) interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, (5) standar usaha, (6) pasar, (7) pengembangan ekonomi dan badan usaha, (8) perlindungan kesehatan, (9) kepemimpinan dan pendidikan, dan (10) bantuan bencana kemanusiaan. Bagi perusahaan yang berupaya untuk membangun citra positif perusahaannya, maka kesepuluh komponen tersebut harus diupayakan pemenuhannya.

Dalam era reformasi yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keterbukaan (transparency), seharusnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya semakin meningkat. Perusahaan yang tidak memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan sekitarnya akan banyak menemui berbagai kendala seperti seringkali masyarakat sekitar berunjuk rasa, bahkan ada perusahaan yang terpaksa ditutup oleh pihak yang berwenang. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik merupakan berita baik bagi investor dan calon investor. Perusahaan yang memiliki tingkat kinerja lingkungan yang tinggi akan direspon secara positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan secara relatif dalam industri yang bersangkutan merupakan cerminan pencapaian kinerja ekonomi perusahaan. Begitu pula dengan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan manufaktur yang dinilai sebagai

perusahaan berisiko lingkungan yang tinggi, perusahaan dengan pengungkapan informasi lingkungan yang tinggi dalam laporan keuangannya akan lebih dapat diandalkan, laporan keuangan yang handal tersebut akan berpengaruh secara positif terhadap kinerja ekonomi, dimana investor akan merespon secara positif dengan fluktuasi harga pasar saham yang semakin tinggi, dan begitu pula sebaliknya (Saputra dan Maksum, 2007). Lebih lanjut Raka (2001) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah *input* menjadi *output*, melainkan sebuah lembaga insan (*human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin baik semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Dalam menghadapi tekanan tersebut, maka perusahaan diminta agar dapat memberikan informasi mengenai perusahaannya dengan lebih transparan melalui laporan tahunan atau laporan sosial yang terpisah sehingga diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Menyadari hal itu kalangan perusahaan tidak berdiam diri, sebagian perusahaan mulai mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber daya yang diambil dari masyarakat kepada lingkungan sosialnya. Sebagai upaya untuk menunjukkan tingkat pertanggungjawabannya, perusahaan mulai memberikan penjelasan dan pelaporan kepada masyarakat mengenai berbagai aktivitas sosial

dan lingkungannya, baik melalui media *ekstern* yang dikeluarkan oleh pihak ketiga maupun media internal (termasuk laporan keuangan) yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri.

Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), secara implisit juga telah mengakomodasi hal tersebut. Misalnya sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 (revisi 1999) paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi social melalui laporan tambahan. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut.

Adapun salah satu jenis laporan terpisah yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan informasi tentang pengungkapan sukarela (voluntary

disclosure) yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial. Pengungkapan sukarela muncul karena adanya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, keberhasilan perusahaan tidak hanya pada menghasilkan laba saja tetapi ditentukan juga oleh kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar (Yuliani, 2003).

Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya (Novita dan Djakman, 2008). Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Surtijo (2000) menggunakan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan bank dan non bank, hasilnya tidak signifikan. Subiyantoro (dalam Rahayu, 2006) menggunakan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan manufaktur dan non manufaktur, tetapi hasilnya tidak signifikan. Dalam penelitian Rahayu (2006) memasukkan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan jasa dan non jasa (riil), hasilnya tidak signifikan. Sedangkan dalam penelitian Yuningsih (2003) dan Sembiring (2005) yang menggunakan variabel industri yang dikelompokkan dalam industri *high profile* dan *low profile* memberikan hasil yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang bertipe *high profile* dalam melakukan aktivitasnya banyak memodifikasi lingkungan, dan menimbulkan

dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat, atau secara luas terhadap stakeholdersnya.

Berdasarkan penelitian Hackston & Milne (dikutip oleh Sitepu dan Siregar, 2007) ukuran perusahaan dan tipe industri memiliki hubungan signifikan dengan pengungkapan informasi sosial, sebaliknya tidak ditemukan hubungan antara laba dengan pengungkapan informasi sosial. Fitriani (dikutip oleh Sitepu dan Siregar, 2007) menemukan bahwa pengungkapan informasi sosial dipengaruhi oleh *size* perusahaan, status perusahaan, profitabilitas dan KAP. Penelitian Sembiring (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan, namun tidak menemukan hubungan signifikan antara profitabilitas dan leverage dengan pengungkapan informasi sosial. Anggraini (2006) menemukan hubungan signifikan antara persentase kepemilikan manajemen dengan pengungkapan informasi sosial, namun tidak berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan.

Penelitian ini mencoba melakukan analisis terhadap praktek pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap industri. Jenis industri digolongkan menjadi 9 jenis kelompok industri. Luas pengungkapan antar perusahaan dalam industri dengan industri lainnya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh kandungan resiko masing-masing industri yang berbeda, karena masing-masing industri memiliki karakteristik yang berbeda. Cooke (dalam Suropto, 2000) menyatakan bahwa luas pengungkapan dalam laporan tahunan

mungkin tidak sama untuk semua sektor ekonomi, hal ini mungkin dikarenakan perbedaan sifat dan karakteristik industri. Sedangkan penelitian Gunawan (2002) membuktikan bahwa faktor kelompok industri mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh jenis industri terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) dalam laporan tahunan perusahaan?
- b. Bagaimana perbedaan luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) dalam laporan tahunan perusahaan pada setiap jenis industri?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris apakah jenis industri mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan *CSR Disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan sehubungan dengan pengungkapan CSR yang telah mereka lakukan selama ini agar dapat menjadikan perusahaan lebih *aware* terhadap pengungkapan CSR di masa mendatang.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh jenis industri terhadap pengungkapan *CSR Disclosure* dan luas pengungkapan *CSR Disclosure* pada masing-masing industri.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholders

Wibisono (dalam Kirana, 2009) mengartikan *Stakeholders* sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip oleh Wibisono (dalam Kirana, 2009), yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini Rhenald Kasali membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

a. *Stakeholders internal dan stakeholders eksternal*

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham (shareholder), sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada diluar lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, dan sebagainya.

b. *Stakeholders primer, stakeholders sekunder dan stakeholders marjinal*

Dalam hal ini *stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders* primer dan *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders*

sekunder, sedangkan yang biasa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.

c. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders* tradisional. Karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi, sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

d. *Proponents*, *opponents*, dan *uncommitted* (pendukung, penentang, dan yang tidak peduli)

Di antara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.

e. *Silent majority* dan *vocal minority* (pasif dan aktif)

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman, 2004). Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar sejalan dengan masyarakat luas. Menurut Gray et al (dalam Ahmad dan Sulaiman, 2004) dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Seperti diindikasikan di atas, salah satu faktor yang banyak di bahas oleh peneliti mengenai motivasi manajer untuk melakukan pengungkapan sosial-lingkungan adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat khususnya atas kelangsungan organisasi. Pandangan ini dicakup dalam teori legitimasi. Menurut Gray et al (dalam Kirana, 2009):

*...a systems-oriented view of the organisation and society ...permits us
to focus on the role of information and disclosure in the relationship(s)*

between organisations, the State, individuals and groups.

Dalam perspektif orientasi sistem, suatu entitas dipengaruhi dan sebaliknya mempengaruhi komunitas dimana entitas itu melakukan kegiatannya. Kebijakan pengungkapan perusahaan dipandang sebagai suatu hal penting dimana manajer dapat mempengaruhi persepsi pihak lain atas organisasi tersebut.

Teori legitimasi telah menjadi salah satu teori yang paling sering digunakan terutama ketika berkaitan dengan wilayah sosial dan akuntansi lingkungan. Meskipun masih terdapat pesimisme yang kuat yang dikemukakan oleh banyak peneliti, teori ini telah dapat menawarkan sudut pandang yang nyata mengenai pengakuan sebuah perusahaan secara sukarela oleh masyarakat.

2.1.3 Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Pengertian Corporate Sosial Responsibility (CSR) menurut The World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keprilakuan (behavioural ethnics) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic development). Komitmen yang lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas (Effendi, 2009). Sedangkan menurut Daniri (2008) CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategi stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya.

Konsep Corporate Sosial Responsibility (CSR) dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba, sehingga CSR merupakan sebuah strategi dalam operasi

bisnis. Sedangkan konsep yang kedua menyatakan bahwa tujuan dari perusahaan mencari laba (Profit), menyejahterakan orang (People) dan menjamin keberlanjutan hidup dari planet (Planet).

Global Compact Initiative (GCI) menyebut konsep ini dengan 3P, yaitu: *Profit* (effectivity, efficiency, flexibility and creativity), *People* (health, safety and welfare), dan *Planet* (environmental quality and disturbances) dimana gagasan tersebut menjadikan perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*finansial*) saja. Elkington (dalam Effendi, 2009) menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (profit, people, and planet). Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Wibowo, 2007). Daniri (2008) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu selain aspek finansial juga aspek sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, merupakan suatu keharusan bagi suatu *corporate* mengingat perkembangan dan laju perekonomian bangsa Indonesia semakin pesat hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan nasional yang modalnya

dari Negara, perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, perusahaan gabungan antara pihak swasta nasional dengan Negara manapun, perusahaan patungan antara pihak asing dengan Negara dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Memang dalam melaksanakan CSR tersebut banyak perusahaan yang masih pikir-pikir karena mereka takut akan merugikan perusahaan dalam jangka waktu yang singkat.

Dauman dan Hargreaves (dalam Sulastini, 2007) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut:

1. *Basic Responsibility* (BR)

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

2. *Organization Responsibility* (OR)

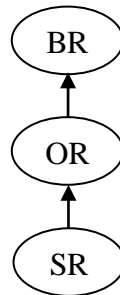
Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan "*Stakeholder*" seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya. Contohnya: bertanggung jawab terhadap investor untuk memaksimalkan profit dan mensejahterakan karyawan.

3. *Societal Responses* (SR)

Pada level ketiga, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. Contohnya: melakukan *recruitment* tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Gambar 2.1

Tingkatan Tanggung Jawab Perusahaan



Sumber: Dauman dan Hargreaves dalam Sulastini (2007)

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Chariri, 2008). Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para *shareholder* sebagaimana selama ini terjadi, namun telah bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholders*) yang selanjutnya disebut *Sosial Responsibility*. Fenomena seperti ini sering terjadi sebagai implikasi banyaknya tuntutan dari masyarakat akibat negatif yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi

adanya operasional perusahaan. Berdasarkan pada asumsi dasar *stakeholder theory* tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri operasinya dengan lingkungan sosial sekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser tujuan yang semula diukur dengan *ecocomic orientation* ke arah *stakeholder orientation* yaitu dengan memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan.

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan, atas dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya yang berpengaruh terhadap masyarakat internal maupun eksternal dalam lingkungan perusahaan. Selain melakukan aktivitas yang berorientasi pada laba, perusahaan perlu melakukan aktivitas lain, misalnya aktivitas untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawannya, menjamin bahwa proses produksinya tidak mencemarkan lingkungan sekitar perusahaan, melakukan penempatan tenaga kerja secara jujur, menghasilkan produk yang aman bagi para konsumen, dan menjaga lingkungan eksternal untuk mewujudkan kepedulian sosial perusahaan.

Selain tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham (shareholder), tanggung jawab lainnya menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility*) dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan

hidup (*sustainable environment responsibility*) (Effendi, 2009). Hal ini sesuai dengan tiga kepentingan publik yang cenderung terabaikan oleh perusahaan yaitu:

- a. Perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya (shareholder), sedangkan masyarakat di sekitar tempat perusahaan tersebut berdomisili kurang diperhatikan.
- b. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, sebagian besar keuntungan manfaat hanya dinikmati oleh pemegang saham perusahaan saja.
- c. Masyarakat sekitar yang menjadi korban perusahaan tersebut sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. hal itu dikarenakan belum adanya hukum (regulasi) yang mengatur secara jelas tentang akuntabilitas dan kewajiban perusahaan kepada publik.

Perusahaan memiliki kewajiban sosial terhadap apa yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan.

Effendi (2009) menyatakan ada empat manfaat yang diperoleh perusahaan jika mengimplementasikan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas.
- b. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal).

- c. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas.
- d. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).

2.1.4 Pengungkapan CSR

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan (disclosure) yaitu: (1) untuk siapa informasi diungkapkan, (2) apa tujuan informasi tersebut, (3) berapa banyak informasi yang diungkapkan (Hendriksen, 2001). Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup.

Effendi (2009) mengatakan bahwa terdapat dua hal yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan (internal drivers). Yang termasuk ke dalam faktor pendorong dari luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari operasi perusahaan.

Dalam peraturan nasional, ketentuan tentang kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan dapat dijumpai dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi: *"Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di*

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan“.

Namun, UU PT tersebut tidak menyebutkan secara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3, dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.” PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh peraturan pemerintah yang hingga kini belum dikeluarkan. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), akan membawa perubahan besar terhadap manajemen PT. Dimana PT didorong untuk mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, dalam UU tersebut perusahaan harus memiliki komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk memperhatikan Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan audit PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sedangkan yang termasuk faktor pendorong dari dalam perusahaan yaitu bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (stakeholders),

termasuk tingkat kepedulian atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (community development responsibility) (Effendi, 2009).

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure), yang merupakan pengungkapan minimum yang harus diungkapkan (diwajibkan peraturan) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yang merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, di mana perusahaan bebas memilih jenis informasi yang diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam mengambil keputusan.

Tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Report*. Sedangkan *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Nurlela dan Islahuddin, 2008).

Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. *Sustainability Report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* yang membawanya menuju kepada bisnis utama (core business) dan sektor industrinya. Salah satu panduan pelaporan yang banyak digunakan sebagai standar pelaporan saat ini oleh perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan UNEP pada tahun 1997 adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) (Tabel 2.1).

Tabel 2.1

Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI

A	<i>Economic (EC)</i>	<i>Performance Indicators</i>
	<i>Aspect: Economic Performance</i>	<p><i>EC1 (CORE)</i> Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.</p> <p><i>EC2 (CORE)</i> Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change.</p> <p><i>EC3 (CORE)</i> Coverage of the organization's defined benefit plan obligations.</p> <p><i>EC4 (CORE)</i> Significant financial assistance received from government.</p>
	<i>Aspect: Market Presence</i>	<p><i>EC5 (ADD):</i> Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage at significant locations of operation.</p> <p><i>EC6 (CORE):</i> Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.</p> <p><i>EC7 (CORE):</i> Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation.</p>
	<i>Aspect: Indirect Economic Impacts</i>	<p><i>EC8 (CORE):</i> Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement.</p> <p><i>EC9 (ADD):</i> Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.</p>

B	<i>Environment (EN)</i>	<i>Performance Indicators</i>
	<i>Aspect: Materials</i>	<p><i>EN1 (CORE): Materials used by weight or volume.</i></p> <p><i>EN2 (CORE): Percentage of materials used that are recycled input materials.</i></p>
	<i>Aspect: Energy</i>	<p><i>EN3 (CORE): Direct energy consumption by primary energy source.</i></p> <p><i>EN4 (CORE) Indirect energy consumption by primary source.</i></p> <p><i>EN5 (ADD) Energy saved due to conservation and efficiency improvements.</i></p> <p><i>EN6 (ADD) Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy-based products and services, and reductions in energy requirements as a result of these initiatives.</i></p> <p><i>EN7 (ADD) Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.</i></p>
	<i>Aspect: Water</i>	<p><i>EN8 (CORE): Total water withdrawal by source.</i></p> <p><i>EN9 (ADD): Water sources significantly affected by withdrawal of water.</i></p> <p><i>EN10 (ADD): Percentage and total volume of water recycled and reused.</i></p>
	<i>Aspect: Biodiversity</i>	<p><i>EN11 (CORE): Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.</i></p> <p><i>EN12 (CORE): Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.</i></p>

		<p><i>EN13 (ADD):</i> <i>Habitats protected or restored.</i></p> <p><i>EN14 (ADD):</i> <i>Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.</i></p> <p><i>EN15 (ADD):</i> <i>Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Emissions,</i> <i>Effluents, and</i> <i>Waste</i></p>	<p><i>EN16 (CORE):</i> <i>Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.</i></p> <p><i>EN17 (CORE):</i> <i>Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.</i></p> <p><i>EN18 (ADD):</i> <i>Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.</i></p> <p><i>EN19 (CORE):</i> <i>Emissions of ozone-depleting substances by weight.</i></p> <p><i>EN20 (CORE):</i> <i>NO_x, SO_x, and other significant air emissions by type and weight.</i></p> <p><i>EN21 (CORE):</i> <i>Total water discharge by quality and destination.</i></p> <p><i>EN22 (CORE):</i> <i>Total weight of waste by type and disposal method.</i></p> <p><i>EN23 (CORE):</i> <i>Total number and volume of significant spills.</i></p> <p><i>EN24 (ADD):</i> <i>Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally.</i></p> <p><i>EN25 (ADD):</i> <i>Identity, size, protected status, and biodiversity value of</i></p>

		<i>water bodies and related habitats significantly affected by the reporting organization's discharges of water and runoff.</i>
	<i>Aspect: Products and Services</i>	<p><i>EN26 (CORE): Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation.</i></p> <p><i>EN27 (CORE): Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.</i></p>
	<i>Aspect: Compliance</i>	<i>EN28 (CORE): Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and regulations.</i>
	<i>Aspect: Transport</i>	<i>EN29 (ADD): Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization's operations, and transporting members of the workforce.</i>
	<i>Aspect: Overall</i>	<i>EN30 (ADD): Total environmental protection expenditures and investments by type.</i>
C	<i>Human Right (HR)</i>	<i>Performance Indicators</i>
	<i>Aspect: Investment and Procurement Practices</i>	<p><i>HR1 (CORE): Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights clauses or that have undergone human rights screening.</i></p> <p><i>HR2 (CORE): Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on human rights and actions taken.</i></p> <p><i>HR3 (ADD): Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained.</i></p>
	<i>Aspect: Non-discrimination</i>	<i>HR4 (CORE): Total number of incidents of discrimination and actions taken.</i>

	<i>Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining</i>	<i>HR5 (CORE): Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights.</i>
	<i>Aspect: Child Labor</i>	<i>HR6 (CORE): Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the elimination of child labor.</i>
	<i>Aspect: Forced and Compulsory Labor</i>	<i>HR7 (CORE): Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures taken to contribute to the elimination of forced or compulsory labor.</i>
	<i>Aspect: Security Practices</i>	<i>HR8 (ADD): Percentage of security personnel trained in the organization's policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations.</i>
	<i>Aspect: Indigenous Rights</i>	<i>HR9 (ADD): Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken.</i>
D	<i>Labor Practices & Decent Work (LA)</i>	<i>Performance Indicators</i>
	<i>Aspect: Employment</i>	<i>LA1 (CORE): Total workforce by employment type, employment contract, and region</i> <i>LA2 (CORE): Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region.</i> <i>LA3 (ADD): Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations.</i>
	<i>Aspect: Labor/ Management Relations</i>	<i>LA4 (CORE): Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.</i> <i>LA5 (CORE): Minimum notice period(s) regarding significant operational changes, including whether it is specified in collective agreements.</i>

	<p><i>Aspect:</i> <i>Occupational Health and Safety</i></p>	<p><i>LA6 (ADD):</i> <i>Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs.</i></p> <p><i>LA7 (CORE):</i> <i>Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work-related fatalities by region.</i></p> <p><i>LA8 (CORE):</i> <i>Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases.</i></p> <p><i>LA9 (ADD):</i> <i>Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Training and Education</i></p>	<p><i>LA10 (CORE):</i> <i>Average hours of training per year per employee by employee category.</i></p> <p><i>LA11 (ADD):</i> <i>Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings.</i></p> <p><i>LA12 (ADD):</i> <i>Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Diversity and Equal Opportunity</i></p>	<p><i>LA13 (CORE):</i> <i>Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity.</i></p> <p><i>LA14 (CORE):</i> <i>Ratio of basic salary of men to women by employee category.</i></p>
E	<p><i>Product Responsibility (PR)</i></p>	<p><i>Performance Indicators</i></p>

	<p><i>Aspect:</i> <i>Customer Health and Safety</i></p>	<p><i>PR1 (CORE):</i> <i>Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures.</i></p> <p><i>PR2 (ADD):</i> <i>Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety impacts of products and services, by type of outcomes.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Product and Service Labeling</i></p>	<p><i>PR3 (CORE):</i> <i>Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services subject to such information requirements.</i></p> <p><i>PR4 (ADD):</i> <i>Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes.</i></p> <p><i>PR5 (ADD):</i> <i>Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Marketing Communications</i></p>	<p><i>PR6 (CORE):</i> <i>Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship.</i></p> <p><i>PR7 (ADD):</i> <i>Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Customer Privacy</i></p>	<p><i>PR8 (ADD):</i> <i>Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Compliance</i></p>	<p><i>PR9 (CORE):</i> <i>Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services.</i></p>
F	Society (SO)	Performance Indicators

	<i>Aspect: Community</i>	<i>SO1 (CORE): Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting.</i>
	<i>Aspect: Corruption</i>	<i>SO2 (CORE): Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption.</i> <i>SO3 (CORE): Percentage of employees trained in organization's anti-corruption policies and procedures.</i> <i>SO4 (CORE): Actions taken in response to incidents of corruption.</i>
	<i>Aspect: Public Policy</i>	<i>SO5 (CORE): Public policy positions and participation in public policy development and lobbying.</i> <i>SO6 (ADD): Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country.</i>
	<i>Aspect: Anti-Competitive Behavior</i>	<i>SO7 (CORE): Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.</i>
	<i>Aspect: Compliance</i>	<i>SO8 (CORE): Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with laws and regulations.</i>

Sumber: *Global Reporting Initiative (GRI) (2006)*

2.2 Penelitian Terdahulu

Yuningsih (2003) meneliti tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. penelitian ini dilakukan terhadap 20 perusahaan publik yang termasuk dalam kelompok 20 perusahaan terbesar berdasarkan nilai kapitalisasi pasar dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dan sosialnya dalam laporan keuangan tahun 2000 dan 2001. Hasil

dari penelitian ini adalah bahwa ukuran perusahaan, ROA, industri dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap praktek pengungkapan tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan.

Sembiring (2005) meneliti seberapa besar tingkat pengungkapan informasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laporan perusahaan publik di Indonesia tahun 2002. Penelitian ini dilakukan secara random dan menghasilkan 78 perusahaan sebagai sampel. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel size, profile, dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan profitabilitas dan leverage mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Anggraini (2006) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial di dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel prosentase kepemilikan manajemen, tingkat leverage, biaya politik, dan profitabilitas. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial. Sedangkan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial

Novita dan Djakman (2008) melakukan penelitian terhadap kepemilikan asing dan kepemilikan institusi berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan di BEI pada tahun 2006. Hasil dari penelitian

ini menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Hasil ini mencerminkan bahwa kepemilikan institusi yang terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, dana pensiun, dan asset management di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga investor institusi ini juga cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara detail (menggunakan indikator GRI) dalam laporan tahunan perusahaan.

2.3 Hipotesis

Profile perusahaan telah diidentifikasi sebagai faktor potensial yang mempengaruhi praktek pengungkapan sosial perusahaan. Cooke (dalam Gunawan, 2002) menyatakan bahwa luas pengungkapan dalam laporan tahunan mungkin tidak sama untuk semua sektor ekonomi. Menurut Verreccia (dalam Suropto, 2000) biaya *proprietary* (politik dan *competitive disadvantage*) berbeda antar industri. Disamping itu, menurut Meek, Robert dan Gray (dalam Suropto, 2000) relevansi item pengungkapan tertentu berbeda-beda antar industri. Dalam penelitian Suropto (2000) menggunakan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan bank dan non bank, tetapi hasilnya tidak signifikan.

Dalam penelitian Rahayu (2006) variabel industri yang dikelompokkan dalam industri jasa dan non jasa (riil). Perusahaan jasa mempunyai karakteristik yang unik. Karakteristik ini menjadikan industri jasa mempunyai kompleksitas yang berbeda dengan industri pada umumnya. Secara otomatis, luas pengungkapan informasi yang disajikan pun berbeda dengan informasi pada

perusahaan non jasa. Karena bergerak dalam bidang jasa, maka manajemen akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan yang dipublikasikan, tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2006) hasilnya tidak signifikan. Gunawan (2002) mengatakan bahwa perusahaan jasa mempunyai kualitas pengungkapan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non jasa.

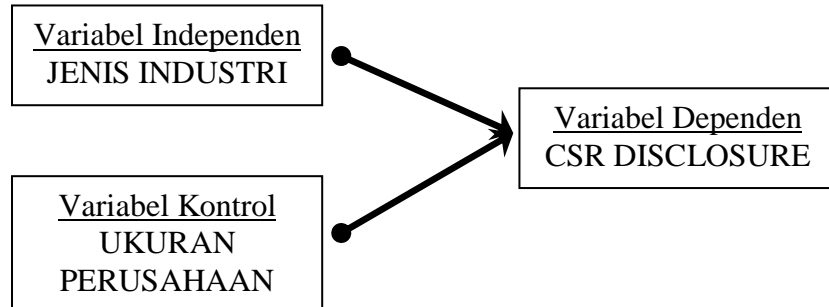
Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan besar mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti oleh publik sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). Menurut Meek, Robert dan Gray (dalam Suripto), variabel ukuran perusahaan (size) merupakan variabel yang paling konsisten berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan sesuai dengan tinjauan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Jenis industri berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan ada perbedaan dalam luas pengungkapan CSR pada masing-masing jenis industri.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Model Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh jenis industri terhadap luas pengungkapan *CSR Disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan dengan cara mengukur variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan tingkat pengungkapan CSR sebagai variabel dependen, jenis industri yang diklasifikasikan dalam 9 jenis industri sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *CSR Disclosure* dengan menggunakan indikator dari Global Reporting Initiative (GRI) dengan jumlah 79 pengungkapan yang meliputi: *economic (EC)*, *environment (EN)*, *human rights (HR)*, *labor practices (LP)*, *product responsibility (PR)*, dan *society (SO)*. *Content Analysis* digunakan untuk melihat pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan menggunakan nilai 1 jika terdapat pengungkapan sesuai dengan indikator GRI dan nilai 0 jika tidak terdapat pengungkapan atau pengungkapan tidak sesuai dengan indikator GRI.

Semakin banyak item yang diungkapkan oleh perusahaan, maka indeksnya akan semakin tinggi. Perusahaan dengan angka indeks yang lebih tinggi

menunjukkan bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan angka indeks yang lebih rendah.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenis industri. Industri diklasifikasikan dalam 9 jenis industri sesuai klasifikasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis-jenis industri tersebut adalah: Pertanian; Pertambangan; Industri Dasar dan Kimia; Aneka Industri; Industri Barang Konsumsi; Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan; Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi; Keuangan; serta Perdagangan, Jasa dan Investasi.

3.2.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti oleh publik sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan jumlah aktiva (log asset) yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2008 merupakan proksi dari ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 yang berjumlah 398 perusahaan. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan tahun 2008 untuk melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang di tentukan.

Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEJ untuk tahun 2009.
2. Menerbitkan laporan tahunan lengkap selama tahun 2008.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 2009	398
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan lengkap selama tahun pengamatan dan data rusak	(196)
Total Sampel	202
Sampel yang digunakan 20% dari total sampel	40

Sumber : Data sekunder 2009 (diolah)

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara probabilitas untuk menilai parameter yang berbeda dalam sub kelompok populasi

yang memiliki jumlah elemen yang berbeda, maka pemilihan pengambilan sampel menggunakan sampel acak berstrata cara disproporsional (berdasarkan kriteria masing-masing industri, bukan jumlah populasi asal industri).

Pengambilan sampel ini lebih efisien dan representatif karena untuk ukuran sampel yang sama, tiap sub kelompok industri terwakili dengan baik dan informasi yang diperoleh lebih berharga serta beragam terkait dengan tiap elemen sub kelompok industri.

Tabel 3.2
Pengambilan Sampel Acak Berstrata Cara Disproporsional

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH ELEMEN	JUMLAH SUBYEK DALAM SAMPEL	
			Proporsional 20% dari elemen	Disproporsional
1	Agriculture	7	1	3
2	Mining	11	2	4
3	Basic Industry and Chemicals	10	2	4
4	Miscellaneous Industry	5	1	3
5	Consumer Goods Industry	11	2	4
6	Property, Real Estate And Building Construction	34	7	5
7	Infrastructure, Utilities & Transportation	19	4	4
8	Finance	47	9	6
9	Trade, Services & Investment	58	12	7
TOTAL SAMPEL		202	40	40

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan tahun 2008 perusahaan sampel. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada alasan:

1. Data mudah diperoleh, hemat waktu dan biaya.
2. Data laporan tahunan telah digunakan dalam berbagai penelitian, baik penelitian di dalam negeri maupun luar negeri.
3. Data laporan tahunan yang tersedia di BEI memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya karena telah diaudit oleh auditor independen.

Laporan tahunan perusahaan yang dijadikan obyek adalah laporan tahunan perusahaan tahun 2008 karena data tersebut adalah data terbaru pada saat dilakukan penelitian, sementara laporan tahunan perusahaan tahun 2009 belum diterbitkan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan pada periode tahun 2008 di website BEI (www.idx.co.id). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan perusahaan yang terpilih menjadi sampel. Sebagai panduan, digunakan instrumen penelitian berupa *check list* atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan pertanggungjawaban sosial *Global Reporting Initiative* (GRI).

3.4 Model Analisis

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

3.4.1.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan secara linier. Multikolinearitas terjadi apabila antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan memperhatikan:

1. Besaran korelasi antar variabel independen.

Pedoman suatu model regresi bebas multikolineritas, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Koefisien korelasi antar variabel-variabel independen harus lemah tidak lebih besar dari 90 persen (dibawah 0,9).
- b. Jika korelasi kuat antara variabel-variabel Independen dengan variabel independen lainnya yaitu korelasi diatas 90 persen (0,9), maka hal ini menunjukkan terjadinya multikolinearitas yang serius.

2. Nilai tolerance dan VIF yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

Persamaan yang digunakan adalah:
$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

Nilai *cutoff* yang dipakai untuk menandai adanya faktor-faktor multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinearitas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya.

3.4.1.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya), uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Run Test. Metode ini digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Apabila nilai signifikansinya dibawah 0,05 berarti terdapat gejala autokorelasi.

3.4.1.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah terjadinya varians yang tidak sama untuk variabel independen yang berbeda. Heterokedastisitas dapat terdeteksi dengan melihat plot antara nilai taksiran dengan residual. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk satu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka akan terjadi masalah heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu-sumbu, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.4.1.4 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan memperhatikan penyebaran data (titik) pada normal p-plot of Regression standardizzed residual dari variabel independen, dimana:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi berganda (Multiple Regression) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara tingkat pengungkapan CSR dengan variabel-variabel independen. Persamaan Regresinya adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{CSDI}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{JI Agri}_i + \beta_2 \text{JI Mining}_i + \beta_3 \text{JI BIC}_i + \beta_4 \text{JI Misscl}_i + \beta_5 \text{JI Cons Goods}_i + \beta_6 \text{JI Property}_i + \beta_7 \text{JI Infrast}_i + \beta_8 \text{JI Finance}_i + \beta_9 \text{JI Trade}_i + \beta_{10} \text{UP}_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

CSDI_i : CSR Disclosure Index berdasarkan indikator GRI

JI_i : Jenis Industri, kategori 9 jenis industri

UP_i : Ukuran Perusahaan, *Log asset*

$\beta_0 - \beta_2$: Koefisien yang di estimasi

ε_i : *Error term*

i : 1,2,..., N

dimana N : banyaknya observasi

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan tingkat pengungkapan CSR maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan pengujian dibawah ini.

3.4.2.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Koefisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan antar variabel bebas dengan variabel tidak bebas, sedangkan jika $R^2 = 1$ berarti suatu hubungan yang sempurna. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka digunakan adjusted R^2 sebagai koefisien determinasi.

3.4.2.2 Uji F

Uji ini dilakukan untuk menguji variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel jenis industri dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan.

2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel jenis industri dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan.

3.4.2.3 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara parsial variabel tipe industri dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara parsial variabel tipe industri dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian. Alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini adalah *mean*, minimum, maksimum, dan standar deviasi.

TABEL 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agriculture	3	29	33	30.67	2.082
Mining	4	47	59	51.75	5.252
Basic Industry And Chemicals	4	26	42	33.50	6.758
Miscellaneous Industry	3	23	32	28.67	4.933
Consumer Goods Industry	4	20	48	30.75	12.203
Property, Real Estate And Building Construction	5	26	37	31.20	4.604
Infrastructure, Utilities & Transportation	4	19	36	24.25	8.057
Finance	6	14	20	16.83	2.137
Trade, Services & Investment	7	12	23	16.43	3.952
UP	40	1184	318671	3.65E4	65105.278
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Mutikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independen dalam model regresi ini. Dalam penelitian ini digunakan metode VIF (Variance Inflation Factor).

Nilai VIF pada Tabel 4.2 untuk semua variabel independen dalam penelitian ini kurang dari 10. Menurut Gujarati (dalam Rahayu, 2006), semakin tinggi nilai VIF maka semakin tinggi kolinearitas antar variabel independen. Dengan demikian, hasil uji membuktikan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

TABEL 4.2

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
Agriculture	3.711
Mining	4.518
Basic Industry And Chemicals	4.516
Miscellaneous Industry	3.742
Consumer Goods Industry	4.521
Property, Real Estate And Building Construction	5.272
Infrastructure, Utilities & Transportation	4.609
Finance	7.699
Trade, Services & Investment	6.652
UP	2.450

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS

4.1.2.2 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu dalam satu model regresi linier. Uji autokorelasi yang digunakan adalah uji *Runs Test*.

TABEL 4.3
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00959
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	22
Z	.160
Asymp. Sig. (2-tailed)	.873

a. Median

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS

Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai tes adalah - 0,00959 dengan probabilitas 1,000 signifikan pada 0,05. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai probabilitas berada di atas nilai signifikansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residualnya random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

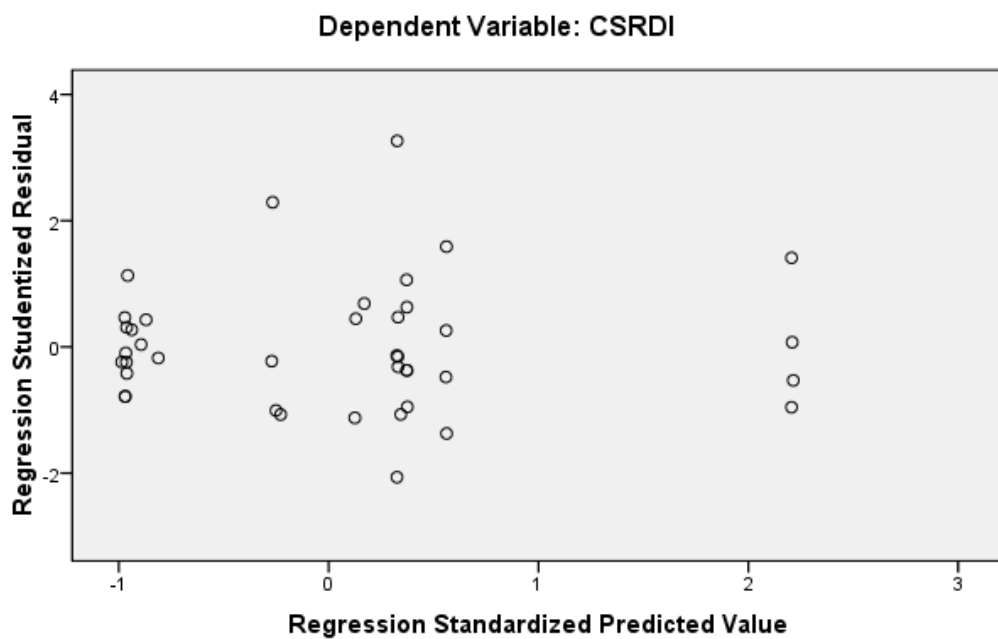
4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah varian tiap variabel pengganggu yang dibatasi oleh nilai tertentu yang mengenai variabel-variabel independen sama atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang berhomoskedastisitas dengan varian yang sama.

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola grafik *scatterplot* (Gambar 4.1).

GAMBAR 4.1

Scatterplot



Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS

Dari Gambar 4.1, tampak bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak menunjukkan pola tertentu. Titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

4.1.2.4 Uji Normalitas Data

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang ada terdistribusi dengan normal atau tidak. Data yang terdistribusi dengan normal

akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Model regresi yang baik mempunyai data yang terdistribusi dengan normal.

Uji normalitas ini menggunakan *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test*. Dari Tabel 4.4 terlihat besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,733 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,656. Nilai ini jauh di atas 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal.

TABEL 4.4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06843705
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.733
Asymp. Sig. (2-tailed)		.656

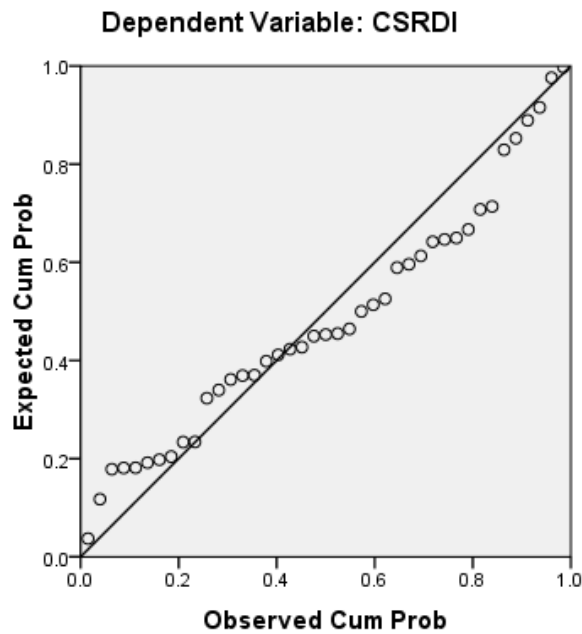
a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS

Hasil ini juga diperkuat oleh Grafik Normal P-P Plot pada Gambar 4.2 yang menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, yaitu nilai *standardized residual* berhimpit atau tersebar dekat disekitar garis 45⁰ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual memenuhi asumsi normalitas.

GAMBAR 4.2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS

4.1.3 Analisis Regresi

4.1.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan tampilan output SPSS model summary pada Tabel 4.5, nilai R^2 adalah 0,751. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada tingkat pengungkapan CSR sebesar 75,1% dapat dijelaskan oleh variabel jenis industri dan variabel ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya ($100\% - 75,1\% = 24,9\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Standar Error of estimated (SEE) sebesar 0,07803.

Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

TABEL 4.5
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.902 ^a	.813	.751	.07803

- a. Predictors: (Constant), UP, Misscl, Infrast, Agri, Cons Goods, Mining, BIC, Property, Trade, Finance
- b. Dependent Variable: CSRDI

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS

4.1.3.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen (jenis industri dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (tingkat pengungkapan CSR). Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya. Apabila signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka model diterima.

TABEL 4.6
Nilai F Hitung Dan Taraf Signifikansi ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.796	10	.080	13.074	.000 ^a
	Residual	.183	30	.006		
	Total	.979	40			

- a. Predictors: (Constant), UP, Misscl, Infrast, Agri, Cons Goods, Mining, BIC, Property, Trade, Finance
- b. Dependent Variable: CSRDI

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS

Dari uji ANOVA atau F test pada Tabel 4.6 didapat nilai F hitung sebesar 13,074 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi CSRDI atau variabel jenis industri dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap CSRDI.

4.1.3.3 Uji t

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Keputusan dalam uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya. Kaidah pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:

- a. Apabila signifikansi $> 0,05$ maka Hipotesis ditolak
- b. Apabila signifikansi $\leq 0,05$ maka Hipotesis diterima

Hasil atau output analisis regresi dengan menggunakan SPSS yang terlihat dalam Tabel 4.7 menunjukkan bahwa secara parsial, variabel jenis industri berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini didasarkan pada tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$). Sebaliknya, untuk variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel (UP=0,784) tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$). Dari sini dapat

disimpulkan bahwa variabel CSRDI dipengaruhi oleh variabel jenis industri dan ukuran perusahaan dengan persamaan matematis:

$$\text{CSRDI} = 5.621\text{E-}15 + 0.389 \text{ Agri} + 0.654 \text{ Mining} + 0.422 \text{ BIC} + 0.361 \text{ Misscl} + 0.389 \text{ Cons Goods} + 0.395 \text{ Property} + 0.304 \text{ Infrast} + 0.202 \text{ Finance} + 0.206 \text{ Trade} + 8.295\text{E-}8 \text{ UP}$$

TABEL 4.7
Koefisien Regresi, T_{HITUNG}
Dan Tingkat Signifikansi Variabel Regresi

		Coefficients ^a			
Model		Beta	t	Sig.	Interpretasi
1	(Constant)		.000	1.000	
	Agriculture	.656	4.318	.000	Signifikan
	Mining	1.256	7.493	.000	Signifikan
	BIC	.810	4.833	.000	Signifikan
	Misscl	.608	3.987	.000	Signifikan
	Cons Goods	.747	4.453	.000	Signifikan
	Property	.837	4.624	.000	Signifikan
	Infrast	.584	3.447	.002	Signifikan
	Finance	.463	2.116	.043	Signifikan
	Trade	.502	2.465	.020	Signifikan
	UP	.034	.277	.784	Tidak Signifikan

a. Dependent Variable: CSRDI

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS

4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Perhitungan regresi menunjukkan tanda koefisien jenis industri pada masing-masing industri yaitu agriculture (pertanian); mining (pertambangan); basic industry and chemicals (industri dasar dan kimia); miscellaneous industry (aneka industri); consumer goods industry (industri barang konsumsi); property, real estate and building construction (properti, real estate dan konstruksi bangunan); infrastructure, utilities & transportation (infrastruktur, utilitas dan transportasi); finance (keuangan); serta trade, services & investment (perdagangan, jasa dan investasi) bernilai positif dengan β dan $t < (\alpha = 0,05)$ berturut-turut seperti yang terlihat pada Tabel 4.7. Hal ini menyatakan bahwa variabel jenis industri berpengaruh secara signifikan terhadap CSRDI.

Sedangkan hasil regresi pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan t-hitung sebesar 0,277 dengan signifikansi 0,784. Nilai ini berada di atas signifikansi yang telah ditentukan yakni 0,05 sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap CSRDI.

4.2 Interpretasi Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen adalah jenis industri. Sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan.

4.2.1 Jenis Industri

Uji t dengan melihat nilai signifikansi dari variabel independen jenis industri seperti yang terlihat pada Tabel 4.7, menunjukkan bahwa variabel jenis industri berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab

sosial. Hasil ini sesuai dengan penelitian–penelitian sebelumnya yaitu Yuningsih (2003), Sembiring (2005), Anggraini (2006), serta Novita dan Djakman (2008).

4.2.2 Ukuran Perusahaan

Uji t dengan melihat nilai signifikansi dari variabel kontrol ukuran perusahaan (UP) dengan menggunakan proksi *log asset* memiliki nilai sig sebesar $0,784 > 0,05$ (Tabel 4.7). Artinya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) dalam laporan tahunan. Nilai ini membuktikan anggapan bahwa tanggung jawab sosial tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, dimana perusahaan besar belum tentu mengungkapkan informasi yang lebih luas. Hasil ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu antara lain Anggraini (2006).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh jenis industri terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Penelitian ini telah menguji hipotesis dari variabel independen berupa jenis industri yang terdiri dari 9 jenis kelompok industri dimana luas pengungkapan antar perusahaan dalam industri yang satu dengan industri lainnya berbeda-beda dikarenakan masing-masing industri memiliki karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan dari hasil analisis dan pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Berdasarkan 40 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, perusahaan yang paling banyak melakukan pengungkapan CSR adalah PT Timah Tbk (TINS), yaitu 59 item pengungkapan dari 79 item pengungkapan yang seharusnya diungkapkan. Sedangkan pengungkapan paling sedikit dilakukan oleh PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCM) sebanyak 12 item pengungkapan. Sementara dari data pengungkapan CSR berdasarkan jenis industri tampak bahwa jenis industri yang paling banyak melakukan pengungkapan adalah industri pertambangan (mining) sebesar 65,5%, sedangkan industri yang sedikit

melakukan pengungkapan adalah industri perdagangan, jasa dan investasi (Trade, Services & Investment) sebesar 20,8%.

2. Variabel independen berupa jenis industri dan variabel kontrol ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.
3. Tipe Industri memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR yang disajikan dalam laporan tahunan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuningsih (2003), Sembiring (2005), Anggraini (2006), serta Novita dan Djakman (2008).
4. Variabel kontrol berupa ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan konsistensi dengan penelitian terdahulu oleh Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapatnya unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan, dimana tidak adanya suatu ketentuan baku dalam penentuan standar, sehingga nilai pengungkapan yang diperoleh dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagian besar berupa data laporan tahunan perusahaan sehingga tidak semua item di dalam daftar pengungkapan sosial di ungkapkan secara jelas sebagaimana di dalam laporan keberlanjutan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu periode pengamatan, yaitu pada tahun 2009, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diamati kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

5.3 Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Tingkat *Adjusted R²* yang tinggi dari model yang diuji 0.751 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga sebaiknya untuk penelitian-penelitian selanjutnya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga akan lebih menggambarkan tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Penelitian berikutnya juga perlu mempertimbangkan perbaikan dalam penilaian luas pengungkapan sukarela dengan memberi bobot pada tingkat kerincian suatu item informasi yang diungkapkan, sehingga indeks pengungkapan menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fr. R. R. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta)", Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Chariri, A. 2008. "Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan". Jurnal Maksi, Vol. 8, No. 2, pp. 151-169
- Effendi, M. A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan, I. 2002. Pengaruh Kelompok Industri, Basis Perusahaan Dan Tingkat Return Terhadap Kualitas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan: Studi Empiris di BEJ. Tesis S-2. Universitas Gajah Mada.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan, Paragraph 9, Salemba Empat, Jakarta.
- Kirana, R. S. 2009. Studi Perbandingan Pengaturan Tentang *Corporate Social Responsibility* Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip *Good Corporate Governance*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (tidak dipublikasikan).
- Novita dan C. D. Djakmal. 2008. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang

- Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006”. Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak, 23-24 Juli 2008.
- Nurlela dan Islahuddin. 2008. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta)”. Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak, 23-24 Juli 2008.
- Rahayu, W. 2006. “Pengaruh Faktor Keuangan dan Non-Keuangan Terhadap Voluntary Disclosure Index Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Publik”. Skripsi S-1. Universitas Gajah Mada.
- Raka, G. 2001. “Manajemen Perubahan untuk Penerapan Good Corporate Governance”, Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Akuntan Indonesia dan Rapat Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik dan Akuntan Manajemen Tahun 2001. Jakarta.
- Saputra, D. W. dan A. Maksum. 2007. “Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Pengungkapan Informasi Lingkungan Terhadap Kinerja Ekonomi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Akuntansi 11, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Sembiring, E. R. 2006. “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta”, Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 6 Januari, pp. 69-85.
- Sitepu, A. C. dan H. S. Siregar. 2007. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Tahunan Pada Perusahaan

- Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”, Jurnal Akuntansi 19, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Sudarmaji, A. M. dan L. Sularto. 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. Paper disajikan pada Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek dan Sipil) Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007.
- Sulastini, S. 2007. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Social Disclosure* Perusahaan Manufaktur Yang Telah *Go Public*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (tidak dipublikasikan).
- Suripto, B. 2000. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Desember, pp. 31-34. STIE YKPN.
- Utomo, M. M. 2000 “Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia (Studi Perbandingan antara Perusahaan-perusahaan High Profile dan Low Profile)”. Makalah disajikan pada SNA III.
- Wibowo, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Sosial Responsibility. Gresik: Fascho Publishing.
- Yuliani, Rahma, 2003, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktek Pengungkapan Sosial dan Lingkungan di Indonesia”, Tesis Program Studi

Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Semarang (tidak dipublikasikan).

Yuningsih. 2003. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktek Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Publik”. Dilihat pada 4
April 2009.

Referensi Website

Daniri, Mas Achmad. “Standarisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (Bag. 1, 2, dan 3)”, dilihat pada 23 Desember 2009,
www.achmaddaniri.com.

Data Laporan Tahunan Perusahaan 2008, dilihat pada 10-17 Februari 2010,
www.idx.co.id

Indikator GRI (revisi 2006) dalam www.globalreporting.org dilihat pada 10
Januari 2010.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL

NO	JENIS INDUSTRI	KODE	NAMA PERUSAHAAN	Ukuran Perusahaan (Milyar)	CSRD Index
1	Agriculture	AALI	PT Astra Argo Lestari Tbk	7,704	0.38
2		SMAR	PT SMART Tbk	10,097	0.37
3		CRPO	PT Central Proteinaprima Tbk	9,348	0.42
4	Mining	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	5,288	0.59
5		MEDC	PT Medco Energi International Tbk	19,965	0.62
6		ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	10,528	0.66
7		TINS	PT Timah Tbk	6,268	0.75
8	Basic Industry And Chemicals	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk	7,172	0.44
9		INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	10,706	0.33
10		SMGR	PT Semen Gresik Tbk	9,671	0.53
11		JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	5,078	0.39
12	Miscellaneous Industry	ASII	PT Astra International Tbk	77,788	0.41
13		GJTL	PT Gajah Tunggul Tbk	8,698	0.39
14		VOKS	PT Voksel Electric Tbk	1,184	0.29
15	Consumer Goods Industry	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	35,876	0.32
16		RMBA	PT Bentoel International Investama Tbk	4,617	0.38
17		KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	5,768	0.25
18		UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	6,581	0.61

19	Property, Real Estate And Building Construction	ELTY	PT Bakrieland Development Tbk	7,261	0.44
20		CTRA	PT Ciputra Development Tbk	8,174	0.37
21		LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	11,061	0.33
22		ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	4,820	0.47
23		WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5,562	0.37
24	Infrastructure, Utilities & Transportation	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	21,929	0.46
25		JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	14,064	0.29
26		ISAT	PT Indosat Tbk	48,601	0.24
27		TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	86,023	0.24
28	Finance	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	228,090	0.19
29		BDMN	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	103,462	0.23
30		MBRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	318,671	0.22
31		BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	179,644	0.22
32		PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk	63,493	0.18
33		BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	219,639	0.25
34	Trade, Services & Investment	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	5,117	0.24
35		UNTR	PT United Tractors Tbk	20,221	0.23
36		MPPA	PT Matahari Putra Prima Tbk	9,087	0.15
37		MNCM	PT Media Nusantara Citra Tbk	7,612	0.15
38		BHIT	PT Bhakti Investama Tbk	18,504	0.19
39		BNBR	PT Bakrie & Brothers Tbk	28,524	0.29
40		BMTR	PT Global Mediacom Tbk	13,224	0.20

Sumber: IDX STATISTICS 2008

LAMPIRAN B
CSR DISCLOSURE GRI

KODE	PENGUNGKAPAN
EC1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia modal dan pemerintah.
EC2	Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.
EC3	Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.
EC4	Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah.
EC5	Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.
EC6	Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi.
EC7	Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang di level manajemen senior yang diambil dari komunitas setempat di beberapa lokasi operasi.
EC8	Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan atau pun yang sifatnya pro bono.
EC9	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, termasuk luasan dampak.
EN1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran.
EN2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan.

EN3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara langsung maupun tidak langsung.
EN4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung.
EN5	Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik.
EN6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.
EN7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
EN8	Total pemakaian air dari sumbernya.
EN9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata air.
EN10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali.
EN11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi.
EN12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang dilindungi.
EN13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali.
EN14	Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.
EN15	Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang terkena dampak

	operasi, berdasarkan risiko kepunahan.
EN16	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.
EN17	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.
EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
EN19	Emisi dari substansi merusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.
EN20	NO _x , SO _x dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.
EN21	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
EN22	Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
EN23	Total biaya dan jumlah yang tumpah.
EN24	Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapalkan secara internasional.
EN25	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan oleh perusahaan.
EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif ini.
EN27	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori.

EN28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.
EN29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi produk, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.
EN30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.
HR1	Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asasi manusia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.
HR2	Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan.
HR3	Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.
HR4	Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil.
HR5	Prosedur kerja yang teridentifikasi di mana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.
HR6	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak.
HR7	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pegawai tetap.
HR8	Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur

	kerja.
HR9	Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.
LA1	Komposisi jumlah tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi.
LA2	Jumlah total dan rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan area.
LA3	Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap.
LA4	Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif.
LA5	Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama.
LA6	Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.
LA7	Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada dilihat berdasarkan area.
LA8	Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan dan pengendalian risiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.
LA9	Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersama serikat pekerja.
LA10	Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai berdasarkan kategori pegawai.
LA11	Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk maju

	dan terus berkarir.
LA12	Persentase dari para pegawai yang menerima penilaian atas performa dan perkembangan karir mereka secara berkala.
LA13	Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori seperti jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekaragaman lainnya.
LA14	Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan kategori pegawai.
PR1	Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
PR2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
PR4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa, dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
PR5	Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.
PR6	Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama.
PR7	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.

PR8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.
PR9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.
SO1	Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.
SO2	Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisa memiliki risiko terkait tindak penyuapan dan korupsi.
SO3	Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi.
SO4	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindak penyuapan dan korupsi.
SO5	Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur lobi.
SO6	Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi dan instansi terkait oleh negara.
SO7	Total jumlah tindakan hukum terhadap sikap anti kompetisi dan praktek monopoli dan kecurangan-kecurangan yang dihasilkan dari praktek-praktek tersebut.
SO8	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.

Sumber: Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) perusahaan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) (2006)*

LAMPIRAN C

REGRESSION

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	UP, Misscl, Infrac, Agri, Cons Goods, Mining, BIC, Property, Trade, Finance ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CSRDI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.902 ^a	.813	.751	.07803

a. Predictors: (Constant), UP, Misscl, Infrac, Agri, Cons Goods, Mining, BIC, Property, Trade, Finance

b. Dependent Variable: CSRDI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.796	10	.080	13.074	.000 ^a
	Residual	.183	30	.006		
	Total	.979	40			

a. Predictors: (Constant), UP, Misscl, Infrac, Agri, Cons Goods, Mining, BIC, Property, Trade, Finance

b. Dependent Variable: CSRDI

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.621E-15	.078		.000	1.000		
Agri	.389	.090	.656	4.318	.000	.269	3.711
Mining	.654	.087	1.256	7.493	.000	.221	4.518
BIC	.422	.087	.810	4.833	.000	.221	4.516
Misscl	.361	.091	.608	3.987	.000	.267	3.742
Cons Goods	.389	.087	.747	4.453	.000	.221	4.521
Property	.395	.086	.837	4.624	.000	.190	5.272
Infrast	.304	.088	.584	3.447	.002	.217	4.609
Finance	.202	.096	.463	2.116	.043	.130	7.699
Trade	.206	.084	.502	2.465	.020	.150	6.652
UP	8.295E-8	.000	.034	.277	.784	.408	2.450

a. Dependent Variable: CSRDI